

## Penerimaan Pendapatan Daerah Sektor Pajak Bapenda Kabupaten Karawang

Satrio Budi Prakoso<sup>1</sup> Ujang Suherman<sup>2</sup>

[mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup> [ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id](mailto:ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UBP Karawang<sup>1),2)</sup>

Alamat: Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

Korespondensi penulis: [mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id)

**Abstract:** This article aims to find out about the process of receiving revenue from the Karawang BAPENDA tax sector, with a focus on recording, reporting. the reason can provide valuable insight for local governments in increasing effectiveness and efficiency in local tax management. this research method is qualitative using descriptive analysis, which is a research method that tries to describe the object. The results of the study indicate the process of receiving local revenue from the Karawang BAPENDA tax sector by using Sipadi and after being inputted, a tax form is made, namely SSPD, to be submitted to employees and then paid according to tax and will receive STBP and STS will also be made by using the system, it will be more efficient in errors between systems and humans. obstacles in the receipt of local revenue by Bapenda Karawang related to deposit certificates, local tax payment certificates, and proof of payment certificates include data entry errors, incomplete documents, difficulty verifying payments, and technical problems in administration and reporting systems. To address these issues, Bapenda Karawang could improve officer training, use advanced information technology, and increase transparency of financial reporting. Additional measures include strengthening coordination between units, periodic evaluation of systems and procedures, and providing easy and clear access to local revenue information to the public.

**Keywords:** local revenue, finance, national income, taxes

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses penerimaan pendapatan sektor pajak BAPENDA Karawang, dengan fokus pada pencatatan, pelaporan. alasannya dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah. Metode penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yakni metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek. Hasil penelitian menunjukkan proses penerimaan pendapatan daerah sektor pajak BAPENDA Karawang dengan cara menggunakan Sipadi dan setelah di input maka di buatkan formulir pajak yaitu SSPD untuk di serahkan kepada pegawai lalu di bayarkan sesuai pajak dan akan menerima STBP dan akan dibuatkan juga STS dengan menggunakan sistem tersebut akan lebih efisien dalam kesalahan antara sistem dan human. kendala dalam penerimaan pendapatan daerah oleh Bapenda Karawang terkait surat tanda setoran, surat setoran pajak daerah, dan surat tanda bukti pembayaran mencakup kesalahan pengisian data, ketidaklengkapan dokumen, kesulitan verifikasi pembayaran, serta masalah teknis dalam sistem administrasi dan pelaporan. Untuk mengatasi masalah ini, Bapenda Karawang dapat meningkatkan pelatihan petugas, menggunakan teknologi informasi canggih, dan meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Langkah tambahan mencakup memperkuat koordinasi antar unit, evaluasi berkala sistem dan prosedur, serta menyediakan akses informasi pendapatan daerah yang mudah dan jelas kepada publik.

**Kata kunci:** pendapatan daerah, keuangan, pendapatan nasional, pajak

### PENDAHULUAN

Salah satu bagian dari pemerintah yang mendukung industri keuangan dan melakukan pekerjaan pendampingan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Sekitar 2,1 km jauhnya, di Jalan Siliwangi No.2 41312 Karawang, Jawa Barat, terdapat Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang. Secara umum, BAPENDA membantu para pejabat kabupaten dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan bertindak

Received Maret 10, 2024; Accepted April 22, 2024; Published Mei 31, 2024

\* Satrio Budi Prakoso, [mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:mn21.satrioprakoso@mhs.ubpkarawang.ac.id)

sebagai penghubung pemerintah. BAPENDA Sangatlah penting untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi secara global agar dapat mendukung kinerja operasional manajemen keuangan secara efisien dan efektif dengan presisi dan kualitas yang tinggi..(Rao & Setyadi, 2023).

Perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh peran pasar modal, yang merupakan indikator penting dari pertumbuhan ekonomi nasional(Larasati et al., 2023) Hal ini disebabkan oleh kepentingan publik untuk mengetahui apakah uang rakyat telah dibelanjakan secara tepat, efektif, efisien, dan untuk kepentingan publik karena merekalah yang membiayainya melalui pajak. Lebih sulit bagi bisnis untuk menghasilkan pendapatan daripada membelanjakannya. Karena pengeluaran pada dasarnya mudah dilakukan dan rentan terhadap kebocoran dan inefisiensi, maka penting untuk merencanakan, memantau, dan mengawasi pengeluaran..

Berdasarkan fenomena di atas dan KP terdahulu tentang pentingnya mengevaluasi kinerja penerimaan pajak daerah bapenda kabupaten Karawang menggunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi, maka penulis menyusun yang berjudul **“PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PAJAK BAPENDA KABUPATEN KARAWANG”**

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif, analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data dan kesimpulan .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Proses Penerimaan Pendapatan Daerah Sektor Pajak BAPENDA Karawang**

#### **1. Membuat STBP(Surat Tanda Bukti Pembayaran)**

Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah (STBP) harus dibuat, dan ada beberapa tahapan dalam proses yang harus diikuti dengan benar untuk memastikan bahwa pajak telah dibayarkan dan wajib pajak telah menerima bukti pembayaran.



Langkah-langkah umum yang harus dilakukan:

- 1) Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk membayar pajak daerah yang bersangkutan. Jenis pajak, jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan Informasi spesifik mengenai identitas wajib pajak, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas, semuanya termasuk dalam informasi ini.
- 2) Perhitungan pajak Jumlah pajak yang harus dibayarkan harus ditentukan setelah data terkait dikumpulkan. Tergantung pada jenis pajak dan hukum setempat yang berlaku, perhitungan ini dapat berubah.
- 3) Setelah penghitungan, wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Ada beberapa cara untuk membayar, termasuk transfer bank, pembayaran langsung di kantor pajak, dan sistem pembayaran online otoritas pajak.
- 4) Setelah menerima pembayaran, petugas pajak akan mengonfirmasi bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran. Mereka akan menjamin bahwa transaksi pembayaran didokumentasikan secara akurat dan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan yang seharusnya.
- 5) Petugas pajak akan memberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah (STBP) setelah verifikasi pembayaran. Jika diperlukan, seperti untuk alasan administratif atau pengajuan klaim, wajib pajak dapat menyerahkan STBP ini sebagai dokumentasi resmi pembayaran pajak.
- 6) STBP kemudian diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti resmi pembayaran pajak. Disarankan bagi Wajib Pajak untuk menyimpan STBP ini untuk digunakan di masa mendatang dan sebagai bukti pembayaran pajak yang akurat.
- 7) Semua prosedur selesai, sistem pencatatan pajak otoritas pajak harus memiliki catatan yang akurat tentang pembayaran pajak dan penerbitan STBP. Hal ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam administrasi pajak daerah.

## **2. Memasukkan Setoran harian Pentor Kedalam STS(Surat Tanda Setoran)**



Langkah penting dalam manajemen keuangan adalah memasukkan setoran harian ke dalam Surat Tanda Setoran (STS), Langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Setoran harian dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan atau pajak setiap hari seperti pajak hotel, restoran, catering dan lain-lain. Setoran ini dapat berasal dari berbagai transaksi, termasuk penjualan, pembayaran pajak, atau pendapatan lain yang diterima oleh lembaga terkait atau kas kota.
- 2) Tanda Setoran (STS) akan disiapkan oleh petugas keuangan atau penanggung jawab. Setiap setoran harian yang masuk akan didokumentasikan secara resmi dalam STS ini, yang berfungsi sebagai catatan resmi. Jumlah setoran, sumber setoran, tanggal, dan nomor referensi (jika ada) biasanya didokumentasikan dalam STS.
- 3) Petugas keuangan akan mengkonfirmasi data setoran yang diterima sebelum memasukkan setoran ke dalam STS. Hal ini mencakup verifikasi kebenaran jumlah setoran, memastikan setoran berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dan membandingkan data dengan bukti transaksi yang sudah ada.
- 4) Data setoran harian akan dimasukkan ke dalam STS setelah verifikasi selesai. Hal ini mencakup pencatatan semua informasi terkait, termasuk jumlah uang yang disetorkan dan fakta-fakta terkait lainnya, secara tertulis untuk setiap setoran.
- 5) Setelah menyelesaikan STS, petugas yang mengawasi setoran harian akan menandatangani, bersama dengan pihak-pihak lain yang berwenang seperti manajer keuangan atau kepala instansi terkait. Tujuan dari penandatanganan ini adalah untuk mengkonfirmasi keaslian setoran.
- 6) STS akan disimpan dalam arsip yang dikategorikan dan aman setelah ditandatangani. Untuk memastikan bahwa dokumen keuangan selalu diperbarui dan dapat diakses untuk audit di masa depan atau kebutuhan lainnya, pengarsipan sangat penting.

- 7) Setelah itu, informasi dari STS akan digunakan untuk pelaporan keuangan internal dan eksternal. informasi dari STS akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan bulanan atau tahunan.

### 3. Membuat SSPD Surat Setoran Pajak Daerah)

Langkah penting dalam manajemen keuangan adalah memasukkan setoran harian ke dalam Surat Tanda Setoran (STS), terutama dalam hal pembayaran pajak atau pendapatan lainnya kepada pihak berwenang yang sesuai. proses pembuatan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kewajiban pajak daerah dapat dipenuhi dengan benar. Berikut ini adalah uraian kegiatan dalam pembuatan SSPD:

- 1) Pengumpulan Informasi Pajak  
untuk perhitungan pajak yang harus disetor. Informasi ini mencakup jenis pajak yang harus dibayar, besaran pajak yang terutang, dan periode pembayaran.
- 2) Perhitungan Pajak  
Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, dilakukan perhitungan jumlah pajak yang harus disetor. Perhitungan ini bergantung pada tarif pajak yang berlaku dan nilai objek pajak yang menjadi dasar perhitungan.
- 3) Penyusunan SSPD  
SSPD disusun berdasarkan hasil perhitungan pajak. Dokumen ini mencakup informasi seperti identitas wajib pajak (seperti nama, NPWP), jenis pajak, besaran pajak yang harus disetor, serta instruksi pembayaran (ke bank atau tempat pembayaran lainnya).
- 4) Pemeriksaan Kembali  
sebelum SSPD final diserahkan atau diajukan, penting untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada kesalahan perhitungan atau pengisian informasi yang dapat mengganggu proses pembayaran pajak.

5) Pengajuan dan Pembayaran

Setelah SSPD diverifikasi dan dianggap benar, SSPD tersebut diajukan kepada pihak yang berwenang (biasanya kantor pajak daerah atau tempat pembayaran pajak lainnya). Pembayaran pajak dilakukan sesuai dengan instruksi yang tertera dalam SSPD, baik melalui bank maupun cara pembayaran yang telah ditentukan.

6) Pencatatan dan Pelaporan

Setelah pembayaran dilakukan, penting untuk mencatat transaksi tersebut secara akurat. Pelaporan pajak secara berkala (misalnya laporan pajak tahunan atau triwulanan) juga merupakan bagian dari proses administratif yang terkait dengan pajak daerah.

7) Arsip SSPD

SSPD yang sudah dibuat dan dokumen pendukungnya (seperti bukti pembayaran) perlu diarsipkan dengan baik. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan audit atau pemeriksaan di masa depan, serta sebagai referensi historis dalam manajemen keuangan.

## **B. Kendala Penerimaan Pajak Daerah**

Kendala yang mungkin dihadapi dalam penerimaan pendapatan daerah oleh Bapenda Karawang terkait dengan surat tanda setoran, surat setoran pajak daerah, dan surat tanda bukti pembayaran dapat berupa kesalahan dalam pengisian data, ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan, kesulitan dalam verifikasi kebenaran pembayaran, serta masalah teknis dalam sistem administrasi dan pelaporan. Hal-hal ini dapat memperlambat proses penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, kendala-kendala ini juga dapat menimbulkan potensi risiko terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam proses pembayaran dan pencatatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi secara keseluruhan.

## **C. Solusi Penerimaan Pajak Daerah**

Untuk mengatasi kendala dalam penerimaan pendapatan daerah yang terkait dengan surat tanda setoran, surat setoran pajak daerah, dan surat tanda bukti pembayaran, Bapenda Karawang dapat mempertimbangkan beberapa solusi, seperti meningkatkan pelatihan bagi

petugas terkait untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur administrasi, menggunakan sistem teknologi informasi yang lebih canggih untuk mempercepat verifikasi dan pencatatan pembayaran, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara konsisten, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pendapatan daerah secara keseluruhan. Langkah berkelanjutan yang bisa dilakukan Bapenda Karawang adalah meningkatkan koordinasi antara berbagai unit terkait dalam proses penerimaan pendapatan daerah. Hal ini meliputi memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara petugas penerimaan, verifikator, dan penyusun laporan keuangan untuk memastikan bahwa setiap transaksi pendapatan tercatat dengan akurat dan tepat waktu.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem dan prosedur yang digunakan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, baik dari segi teknologi maupun proses administratif, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan.

Penerapan teknologi informasi yang lebih canggih juga dapat membantu dalam otomatisasi proses verifikasi dan pencatatan pendapatan. Ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi.

Terakhir, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah dengan menyediakan akses yang mudah dan jelas terhadap informasi mengenai pendapatan daerah kepada publik, dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik atau pertanyaan terkait dengan integritas pengelolaan keuangan daerah, dengan langkah-langkah ini diharapkan BAPENDA Karawang dapat mengatasi kendala-kendala yang terkait dengan penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat menarik kesimpulan proses penerimaan pendapatan sector pajak daerah BAPENDA Karawang dimulai dengan surat tanda bukti pembayaran, surat tanda setoran dan surat setoran pajak daerah yang berkaitan dengan, surat setoran pajak daerah, dan, menunjukkan pentingnya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi keuangan daerah.

Kendala dalam penerimaan pendapatan daerah oleh Bapenda Karawang yang terkait dengan surat tanda setoran, surat setoran pajak daerah, dan surat tanda bukti pembayaran

meliputi kesalahan dalam pengisian data, ketidaklengkapan dokumen, kesulitan dalam verifikasi kebenaran pembayaran, serta masalah teknis dalam sistem administrasi dan pelaporan. Kendala-kendala ini dapat memperlambat proses penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah, mempengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan, serta Merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, Bapenda Karawang dapat meningkatkan pelatihan yang diberikan kepada para pejabatnya, menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih, dan mendorong transparansi yang lebih besar dalam pelaporan keuangan. langkah-langkah tambahan termasuk memperkuat koordinasi antar unit terkait, melakukan evaluasi berkala terhadap sistem dan prosedur, serta menyediakan akses mudah dan jelas terhadap informasi pendapatan daerah kepada publik. Dengan demikian, diharapkan Bapenda Karawang dapat mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Larasati, A., Lestari, D. P., Prakoso, S. B., Virgita, V. L., & Suherman, U. (2023). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Rupiah/US Dollar Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022*.
- Rao, R. A., & Setyadi, R. (2023). Analisis UX Pada Aplikasi SISMIOP Bapenda Kab. Pemalang Menggunakan Metode User Experience Questionnaire. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 3(6), 1263–1271.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>